

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2011
2011**

PERDA KABUPATEN SAMBAS NO.1, LD.2011/NO.1 SETDA KABUPATEN SAMBAS : 6 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2011**

ABSTRAK

- :
- Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sambas serta Prioritas dan Plafon Anggaran.yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Sambas.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.
 - Penjelasan ... hlm

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

2011

PERDA KABUPATEN SAMBAS NO.5, LD.2011/NO.2 SETDA KABUPATEN SAMBAS : 12 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

ABSTRAK

- :
- Bahwa Jasa Konstruksi mempunyai peran strategis dalam menunjang pembangunan daerah karena produk akhirnya menghasilkan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengaturan Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk : menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi; memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas; mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi.

Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.
 - Penjelasan 4 hlm

PENCABUTAN 7 (TUJUH) BUAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

2011

PERDA KABUPATEN SAMBAS NO.6, LD.2011/NO.3 SETDA KABUPATEN SAMBAS : 3 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS PENCABUTAN 7 (TUJUH) BUAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

ABSTRAK

- :
- Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 180 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat 7 (tujuh) buah Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Retribusi Daerah tidak boleh diberlakukan lagi
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perda- perda Kabupaten Sambas yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Perda-perda tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sambas : Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2000 Nomor 14); Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2002 Nomor 22); Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2002 Nomor 49); Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2002 Nomor 50); Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2002 Nomor 51); Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2003 Nomor 19) ; dan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 5).

Catatan

- :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Mei 2011.
 - Penjelasan 1 hlm

PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

2011

PERDA KABUPATEN SAMBAS NO.2, LD.2011/NO.4 SETDA KABUPATEN SAMBAS : 41 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

- ABSTRAK** :
- Dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan, guna meningkatkan penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan serta memberikan jaminan perlindungan pada masyarakat perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Sambas.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Staatblad Nomor 419 tanggal 22 Desember 1949, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/Menkes/PER/II/1990, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/PER/XII/1990, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 061/Menkes/PER/I/1991, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 258/Menkes/PER/III/1992, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 867/Menkes/PER/VIII/2004, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/MENKES/PER/X/2004, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/MENKES/PER/V/2006, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/PER/IV/2007, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/Menkes/PER/V/2004, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/MENKES/PER/11/2008, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/MENKES/PER/I/2010, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2006
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Maksud Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan adalah : melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan atau

Catatan

:

bahaya terhadap kesehatan akibat pelayanan yang tidak sesuai standar; memberikan kemudahan dalam pelayanan izin penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan; melakukan pengaturan jumlah dan kepadatan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah untuk menjamin pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan; dan memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ada di Daerah.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Juni 2012.
- Penjelasan 8 hlm

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2011

2011

PERDA KABUPATEN SAMBAS NO. , LD.2011/NO.6 SETDA KABUPATEN SAMBAS : 3 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK

- :
- Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2011
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan .

Catatan

- :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Oktober 2011
 - Penjelasan ... hlm

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

2011

PERDA KABUPATEN SAMBAS NO. 9, LD.2011/NO.7 SETDA KABUPATEN SAMBAS : 15 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

ABSTRAK

- :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.

Catatan

- :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Desember 2011
 - Penjelasan 7 hlm

RETRIBUSI JASA UMUM

2011

PERDA KABUPATEN SAMBAS NO. 10, LD.2011/NO.9 SETDA KABUPATEN SAMBAS : 15 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS RETRIBUSI JASA UMUM

- ABSTRAK** :
- Bahwa agar Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat disusun dan dilaksanakan secara efektif, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang retribusi daerah diatur sesuai golongan retribusi.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 50/M-DAG/PER/10/2009, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 51/M-DAG/PER/10/2009, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008.

Catatan

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri atas : Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang; dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2011
- Penjelasan 6 hlm

RETRIBUSI JASA USAHA

2011

PERDA KABUPATEN SAMBAS NO. 11, LD.2011/NO.10 SETDA KABUPATEN SAMBAS : 34 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK

- :
- Bahwa agar Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat disusun dan dilaksanakan secara efektif, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang retribusi daerah diatur sesuai golongan retribusi.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri atas : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Retribusi Tempat Pelelangan; Retribusi Terminal; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan Retribusi Penyeberangan di Air.

Catatan

- :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Desember 2011
 - Penjelasan 7 hlm

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

2011

PERDA KABUPATEN SAMBAS NO. 12 LD.2011/NO.11 SETDA KABUPATEN SAMBAS : 30 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

- | | | |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABSTRAK | : | <ul style="list-style-type: none">– Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.– Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Gangguan (<i>Hinder Ordonantie</i>) Stbl Tahun 1926 Nomor 225, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008.– Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Gangguan; Retribusi Izin Trayek; dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. |
| Catatan | : | <ul style="list-style-type: none">– Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2011– Penjelasan 6 hlm |